Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN : 2962-4037; p-ISSN : 2962-4452, Hal. 581-598
DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5966
Available online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

Telaah Kritis Kurikulum 1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), Kurikulum 1975 (Kurikulum Sekolah Dasar) dan Kurikulum 1984

Arry Widyanti [1*], Andria Sari [2], Asih Umi Kholifah [3], Memik Nor Fadilah [4], Munirotun [5], Umi Royani [6], Ngasbun Egar [7]
[1-7] Universitas PGRI Semarang, Indonesia
Email: [1*] *arrywidyanti28@gmail.com*, [2] *andriasari79@gmail.com*, [3] *umiuntung1974@gmail.com*, [4] *memoafaradila@gmail.com*, [5] *muniratun12@gmail.com*, [6] *umiroyanibk81@gmail.com*, [7] *ngasbunegar@upgris.ac.id*

Alamat: Jl. Sidodadi Timur No. 24, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Indonesia
Korespodensi email: arrywidyanti28@gmail.com

Abstract. *The development of curriculum in Indonesia reflects the dynamic interplay of social, political, and national education policy shifts over time. This study aims to analyze and compare the 1973 Pilot Project for the Developmental School (PPSP) Curriculum, the 1975 Curriculum, and the 1984 Curriculum, focusing on their historical background, content, implementation, evaluation, and relevance to current educational contexts. Using a descriptive-critical approach, this research is based on literature review of curriculum documents, education policies, and expert opinions. The findings reveal that each curriculum embodies distinct characteristics aligned with the national development agenda and prevailing educational paradigms of its time. The 1973 PPSP Curriculum emphasized experimental innovation in teaching and learning, the 1975 Curriculum promoted instructional objectives through structured lesson units, while the 1984 Curriculum introduced the concept of Active Student Learning (CBSA) as a core teaching method. This study concludes that a historical understanding of curriculum evolution is crucial for designing future curriculum that are contextual, adaptive, and responsive to the challenges of modern education.*

Keywords: *PPSP 1973, 1975 Curriculum, 1984 Curriculum, Indonesian curriculum history*

Abstrak. Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan kebijakan pendidikan nasional dari waktu ke waktu. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984, dengan menitikberatkan pada latar belakang, isi kurikulum, implementasi, evaluasi pelaksanaan, serta relevansinya terhadap kondisi pendidikan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kritis melalui telaah pustaka terhadap dokumen kurikulum, kebijakan pendidikan, serta pendapat para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing kurikulum memiliki karakteristik unik yang mencerminkan orientasi pembangunan nasional dan paradigma pendidikan pada masanya. Kurikulum PPSP 1973 menekankan inovasi eksperimental dalam proses belajar-mengajar, Kurikulum 1975 mengedepankan pendekatan tujuan instruksional melalui satuan pelajaran, sementara Kurikulum 1984 memperkenalkan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) sebagai metode pembelajaran. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemahaman historis terhadap evolusi kurikulum penting untuk merumuskan kurikulum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan pendidikan di era modern.

Kata kunci: *PPSP 1973, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, sejarah kurikulum Indonesia*

1. LATAR BELAKANG

Kurikulum merupakan rencana dan pengaturan sistematis mengenai tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat kunci dalam pendidikan formal, kurikulum terus berkembang menyesuaikan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, perubahan kurikulum mencerminkan respons terhadap tantangan sosial, politik,

Received: April 05, 2025; Revised: April 28, 2025; Accepted: Mei 17, 2025; Online Available: Mei 19, 2025

dan ekonomi, sekaligus menjadi cerminan falsafah bangsa dalam membentuk masa depan. Pada era 1970–1980-an, Indonesia menerapkan tiga kurikulum signifikan: Kurikulum 1973 (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan/PPSP) yang fokus pada keterampilan dasar dan kejuruan untuk mendukung pembangunan ekonomi; Kurikulum 1975 yang lebih fleksibel dengan penekanan pada pengetahuan akademis dan moral kewarganegaraan; serta Kurikulum 1984 yang mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi untuk menyiapkan SDM menghadapi globalisasi.

Para ahli seperti Taba (1962), Tyler (1949), dan Beauchamp (1986) mendefinisikan kurikulum sebagai rencana pembelajaran terstruktur yang berorientasi pada tujuan, mencakup konten, metode, dan evaluasi, serta hasil kebijakan pendidikan. Karakteristik utamanya meliputi sifat dinamis, adaptif, dan terstruktur untuk memastikan relevansi dengan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan meningkatkan kualitas pendidikan, seperti Kurikulum 1973 yang berfokus pada keterampilan praktis, Kurikulum 1975 yang memperkuat identitas nasional, dan Kurikulum 1984 yang menekankan sains dan teknologi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang, isi, kelebihan, serta pendapat pakar dan praktisi mengenai ketiga kurikulum tersebut, sekaligus mengevaluasi relevansinya dengan konteks pendidikan masa kini. Manfaatnya antara lain sebagai referensi akademis, bahan refleksi bagi pendidik, dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan masa depan. Dengan mempelajari evolusi kurikulum, dapat dipahami bagaimana sistem pendidikan Indonesia beradaptasi untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing secara global.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Saylor & Alexander (1974) yang mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum 1973 (PPSP) muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap pendekatan sentralistik Kurikulum 1968. Hilda Taba (1962) dalam *Curriculum Development: Theory and Practice* menekankan pentingnya kurikulum berbasis kebutuhan lokal, yang tercermin dalam fleksibilitas PPSP dalam mengintegrasikan muatan lokal dan partisipasi masyarakat.

Perubahan paradigma dari Kurikulum 1973 ke Kurikulum 1975 didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008/U/1975 yang menekankan strukturisasi tujuan instruksional. Bloom (1956) melalui *Taxonomy of Educational Objectives* mendukung pendekatan ini dengan klasifikasi tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum 1975 juga mengadopsi prinsip *competency-based education* (CBE) yang dikemukakan Spady (1977), di mana evaluasi berfokus pada penguasaan kompetensi praktis. Namun, Soedijarto (1993) mengkritik keterbatasan pelatihan guru dalam implementasinya, menyebabkan kesenjangan kualitas antar daerah.

Kurikulum 1984, yang diatur dalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983, memperkenalkan pendekatan *CBSA* (Cara Belajar Siswa Aktif). Teori Vygotsky (1978) tentang *scaffolding* dan zona perkembangan proksimal mendasari konsep pembelajaran aktif ini. Nana Syaodih Sukmadinata (1997) dalam *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* menyatakan bahwa kurikulum ini berupaya menyeimbangkan keterampilan teknis dan nilai kebangsaan, sesuai amanat Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang menekankan pendidikan karakter. Namun, Dakir (2004) mencatat bahwa minimnya infrastruktur teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan kurikulum ini di daerah terpencil.

Secara hukum, ketiga kurikulum ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 tentang hak warga negara memperoleh pendidikan. Perkembangannya menunjukkan evolusi dari pendekatan *teacher-centered* ke *student-centered*, sejalan dengan rekomendasi UNESCO (1996) dalam Learning*: The Treasure Within* yang menekankan pendidikan holistik. Lawton (1983) dalam *Curriculum Studies and Educational Planning* juga menegaskan bahwa perubahan kurikulum harus responsif terhadap tuntutan zaman, sebagaimana tercermin dalam adaptasi Kurikulum 1984 terhadap globalisasi dan teknologi.

Kurikulum merupakan kerangka sistematis yang mengatur tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Taba, 1962; Tyler, 1949). Dalam konteks Indonesia, perubahan kurikulum dari masa ke masa mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan (Nasution, 2008). Kurikulum 1973 (PPSP) muncul sebagai eksperimen pendidikan berbasis sekolah yang menekankan fleksibilitas dan kontekstualisasi pembelajaran sesuai potensi lokal (Beauchamp, 1986). Model ini menjadi pionir desentralisasi kurikulum dengan pendekatan *student-centered learning* dan pengintegrasian muatan lokal, meskipun terbatas pada sekolah percontohan.

Kurikulum 1975 hadir sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1973 dengan struktur yang lebih terstandarisasi dan penekanan pada *Tujuan Instruksional Khusus (TIK)* (Sanjaya, 2008). Kurikulum ini mengadopsi pendekatan sistematis Tyler (1949) yang berorientasi pada pencapaian kompetensi terukur, sekaligus memadukan keterampilan praktis untuk mendukung pembangunan nasional era Orde Baru. Namun, sentralisasi kebijakan mengurangi fleksibilitas sekolah dibandingkan pendahulunya, meski tetap mempertahankan muatan lokal sebagai upaya menjembatani kesenjangan antardaerah.

Selanjutnya, Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai respons terhadap tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi (Sukmadinata, 2015). Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan *CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)* yang sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivis (Piaget, Vygotsky), di mana siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Selain itu, kurikulum ini menguatkan pendidikan vokasional dan sains untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil di era industrialisasi. Evaluasi terhadap ketiga kurikulum ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan sumber daya, dan keselarasan dengan kebutuhan masyarakat (Arikunto, 2015).

Secara teoritis, ketiga kurikulum tersebut merepresentasikan pergeseran paradigma dari kurikulum yang berpusat pada guru (*teacher-centered*) menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual (*student-centered*). Namun, tantangan seperti disparitas kualitas antardaerah, keterbatasan pelatihan guru, dan minimnya infrastruktur pendidikan menjadi faktor penghambat optimalisasi kurikulum (Sugiyono, 2012). Kajian ini memperkuat pandangan bahwa perubahan kurikulum harus berbasis evaluasi holistik dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus mempertimbangkan keberagaman sosial-budaya Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya Kurikulum 1973 (PPSP), 1975, dan 1984. Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti dokumen resmi kurikulum dan peraturan pendidikan nasional pada masa itu, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Metode ini dipilih untuk memahami karakteristik, latar belakang, dan dampak ketiga kurikulum tersebut secara mendalam melalui telaah literatur dan analisis kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (mengkaji dokumen kurikulum dan peraturan), studi pustaka (menelaah literatur terkait), serta wawancara semi-terstruktur dengan tokoh pendidikan dan praktisi kurikulum. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan editing (memeriksa kelengkapan dan kejelasan data), organizing (mengelompokkan data sesuai kerangka penelitian), dan penemuan hasil (menyimpulkan temuan berdasarkan teori dan metode yang digunakan). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara sistematis dan objektif.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang evolusi kurikulum Indonesia pada periode 1970–1980-an, termasuk relevansinya dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi saat itu. Hasilnya diharapkan menjadi referensi akademis, bahan refleksi bagi pendidik, serta masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap tantangan masa depan. Dengan menganalisis kelebihan, kelemahan, dan dampak masing-masing kurikulum, penelitian ini juga menyoroti pentingnya adaptasi kurikulum terhadap perkembangan zaman demi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi, Implementasi dan Evaluasi Kurikulum 1973

Kurikulum 1973, atau Program Pengajaran Satuan Pendidikan (PPSP), merupakan kurikulum eksperimental yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem pendidikan seragam dan sentralistik yang berlaku sebelumnya (Kurikulum 1968). Kurikulum ini berlaku terbatas pada 1973–1975 dan diujicobakan di sekolah-sekolah perintis dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). PPSP mengusung pendekatan desentralistik berbasis satuan pendidikan, di mana sekolah diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk integrasi muatan lokal seperti pertanian, kelautan, atau seni budaya daerah. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari model teacher-centered ke student-centered, dengan penekanan pada pembelajaran kontekstual, partisipasi aktif siswa, dan inovasi guru.

Dalam implementasinya, PPSP dilaksanakan secara terbatas di sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP/SMA) yang memenuhi kriteria kesiapan. Sekolah diberi kebebasan untuk menyusun rencana pengajaran tahunan, program muatan lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis potensi daerah. Guru dilatih untuk mengadopsi metode pembelajaran aktif seperti diskusi, proyek lapangan, dan eksperimen, serta didorong

menjadi pengembang materi ajar kontekstual. Namun, implementasi ini menghadapi kendala seperti kesenjangan sumber daya antarwilayah, keterbatasan pelatihan guru, dan infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi (IKIP/LPTK) dan masyarakat setempat menjadi kunci dalam mendukung adaptasi kurikulum.

Evaluasi terhadap Kurikulum 1973 dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif yang holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teknik evaluasi meliputi portofolio, proyek lapangan, dan observasi perilaku siswa, dengan melibatkan partisipasi guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan dampak positif seperti peningkatan relevansi pembelajaran dengan kehidupan lokal, kreativitas guru, dan keterlibatan siswa, tetapi juga mengungkap tantangan seperti variasi kualitas implementasi dan kurangnya standarisasi dokumentasi. Temuan ini menjadi dasar bagi penyempurnaan kurikulum berikutnya, termasuk penguatan konsep muatan lokal dan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Secara keseluruhan, Kurikulum 1973 (PPSP) merupakan tonggak awal pendekatan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yang meletakkan fondasi bagi prinsip kemandirian sekolah, kontekstualisasi pembelajaran, dan partisipasi masyarakat. Meski bersifat eksperimental, warisan kurikulum ini terlihat dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di era reformasi, yang tetap mempertahankan semangat adaptasi lokal dan fleksibilitas. Keberhasilan dan kegagalan implementasinya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dukungan sumber daya, pelatihan guru berkelanjutan, dan pemerataan infrastruktur dalam reformasi pendidikan.

Deskripsi, Implementasi dan Evaluasi Kurikulum 1975

Kurikulum 1975, dikenal juga sebagai Pendidikan Nasional dan Pembaharuan Kurikulum, merupakan kurikulum yang diimplementasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1975 hingga 1984. Kurikulum ini dirancang sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1973 (PPSP), dengan menekankan pendekatan yang lebih sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada keterampilan praktis. Latar belakang pengembangannya didasari oleh tantangan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, kurangnya relevansi materi ajar dengan dunia kerja, serta kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih terpadu untuk mendukung pembangunan nasional di era Orde Baru. Kurikulum 1975 bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, menyesuaikan pembelajaran dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi, serta mengembangkan keterampilan dasar siswa yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Strukturnya dibagi menjadi mata pelajaran pokok (seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Agama) dan pilihan (seperti Keterampilan dan Seni), dengan penekanan pada pendekatan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) untuk memastikan pencapaian pembelajaran terukur.

Implementasi Kurikulum 1975 di Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan relevan dengan dunia kerja. Pelaksanaannya di sekolah dilakukan secara sistematis, mulai dari jenjang SD hingga SMA, dengan fleksibilitas bagi tiap sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kondisi lokal tanpa mengabaikan struktur nasional. Di SD, fokus pembelajaran pada penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sementara di SMP dan SMA, siswa diberi pilihan mata pelajaran sesuai minat, seperti Teknologi atau Kesenian, untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Jadwal pembelajaran diatur secara terstruktur, dengan alokasi waktu lebih banyak untuk mata pelajaran inti di awal tahun ajaran. Metode pengajaran aktif seperti diskusi, eksperimen, dan proyek tematik diterapkan untuk mendorong partisipasi siswa dan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata.

Pelatihan guru menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum ini. Pemerintah melalui Depdikbud menyelenggarakan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan materi, metode pengajaran modern, dan pendekatan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yang terukur. Guru juga dilatih menggunakan media pembelajaran inovatif dan teknik evaluasi yang beragam, termasuk penilaian formatif dan sumatif. Di sisi sumber daya pendidikan, pemerintah berupaya memenuhi fasilitas sekolah seperti laboratorium, ruang teknologi, dan peralatan olahraga, serta mendistribusikan buku teks yang mengintegrasikan teori dan praktik. Keterlibatan masyarakat, terutama di daerah terpencil, turut mendukung penyediaan bahan ajar lokal dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Meski demikian, kesenjangan fasilitas antardaerah dan keterbatasan pelatihan guru tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum 1975 berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih terorganisir, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa serta dunia kerja.

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa, serta kajian menyeluruh oleh pemerintah dan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum ini berhasil memperkenalkan sistem yang lebih terstruktur dan relevan dengan dunia kerja, meski masih perlu penyempurnaan dalam hal pemerataan sumber daya dan peningkatan kualitas guru. Secara keseluruhan, Kurikulum 1975 menjadi fondasi penting dalam sejarah pendidikan

Indonesia, menekankan keterkaitan antara teori dan praktik, serta meletakkan dasar bagi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di masa depan.

Deskripsi, Implementasi dan Evaluasi Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 yang diterapkan di Indonesia pada periode 1984–1994 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Kurikulum ini dirancang untuk merespons tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks. Tujuannya mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, relevansi pendidikan dengan industri, serta penekanan pada pembelajaran aktif dan pendidikan karakter. Strukturnya terbagi menjadi mata pelajaran wajib (seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Agama) dan pilihan (Fisika, Ekonomi, atau Teknologi Informasi), dengan pendekatan *student-centered* yang mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi, eksperimen, dan proyek kontekstual.

Implementasi kurikulum ini melibatkan pelatihan intensif bagi guru untuk menguasai metode pengajaran modern dan pendekatan Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Sekolah didorong mengadaptasi kurikulum sesuai konteks lokal, dengan penyediaan fasilitas seperti laboratorium dan buku teks terintegrasi keterampilan praktis. Namun, tantangan seperti kesenjangan sumber daya antardaerah dan keterbatasan akses teknologi menghambat pemerataan kualitas pendidikan.

Evaluasi Kurikulum 1984 dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa, serta kajian menyeluruh oleh pemerintah dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan keberhasilan dalam memperkenalkan pembelajaran aktif dan relevansi dengan dunia kerja, meski masih terdapat kelemahan dalam hal pelatihan guru dan infrastruktur. Secara keseluruhan, Kurikulum 1984 menjadi tonggak penting dalam transisi pendidikan Indonesia menuju sistem yang lebih adaptif, praktis, dan berorientasi pada kebutuhan global, meski memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk mengatasi disparitas antardaerah.

Pendapat Pakar dari Sumber Tertulis

Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973 dinilai para pakar sebagai terobosan progresif dalam sejarah pendidikan Indonesia. Darmaningtyas (2004) menyoroti integrasi ilmu pengetahuan dengan kebutuhan pembangunan nasional, menjadikan PPSP sebagai model eksperimental yang efektif dalam menerapkan pembelajaran aktif dan kontekstual. Suyanto (2006) menambahkan bahwa kurikulum ini telah mengadopsi pendekatan tematik dan holistik, menekankan pengembangan kompetensi

siswa melampaui aspek akademik semata. Soedijarto (2008) memandang PPSP sebagai representasi ideal pendidikan berbasis masyarakat, yang menggabungkan pencapaian kognitif dengan pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Zuhairini (1987) mencatat pengaruh PPSP terhadap Kurikulum 1975, terutama dalam pendekatan partisipatif dan aplikasi pengetahuan praktis. Namun, Suparlan (2010) mengkritik keterbatasan implementasinya, seperti kesenjangan sumber daya guru dan dukungan birokrasi, serta sifatnya yang elitis karena hanya diterapkan di sekolah unggulan dengan fasilitas memadai. Secara keseluruhan, PPSP diakui sebagai fondasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia, meski terhambat oleh tantangan replikasi skala luas dan evaluasi dampak jangka panjang.

Kurikulum 1975, yang dikembangkan sebagai implementasi kebijakan pendidikan era Orde Baru, mendapatkan beragam tanggapan kritis dari para pakar pendidikan. Prof. Dr. S. Nasution (1977) mengkritik sifatnya yang terlalu teknokratis dan kaku, dengan sistem Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Khusus (TIK) yang membelenggu kreativitas guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Dedi Supriadi (1980) memperkuat kritik ini dengan mencatat kegagalan implementasi di lapangan, di mana guru—khususnya di daerah—sering kali hanya sekadar menyalin rumusan tujuan tanpa memahami esensi pedagogisnya, sehingga pembelajaran menjadi mekanistik. Slamet PH (1981) menyoroti ketimpangan orientasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif terukur, sementara mengabaikan pengembangan karakter (afektif) dan keterampilan praktis (psikomotorik) siswa. Dari sisi teknis, Fuad Ihsan (1983) mengidentifikasi masalah mendasar terkait kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan realitas di lapangan, termasuk keterbatasan pelatihan guru dan sarana-prasarana yang tidak merata di berbagai wilayah. Winarno Surakhmad (1984) melengkapi kritik ini dari perspektif filosofis, menilai kurikulum terlalu berorientasi pada standarisasi hasil belajar sehingga mengorbankan dimensi humanistik pendidikan. Meskipun diakui sebagai upaya sistematis untuk menyelaraskan pendidikan dengan pembangunan nasional, para pakar sepakat bahwa Kurikulum 1975 gagal mencapai keseimbangan antara struktur administratif dan fleksibilitas pedagogis. Kurikulum ini dinilai terlalu sentralistik, kurang melibatkan guru dalam perancangan, serta tidak responsif terhadap keragaman kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Kritik-kritik ini kemudian menjadi dasar bagi penyempurnaan kurikulum berikutnya, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam pendidikan dasar.

Kurikulum 1984 yang memperkenalkan Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) mendapatkan respons beragam dari para pakar pendidikan. Nasution (1985) mengakui inovasi kurikulum ini dalam menggeser paradigma pembelajaran dari teacher-centered ke student-centered, namun mengkritik implementasinya yang terhambat oleh keterbatasan pemahaman pedagogis guru. Suyanto (1986) memperjelas kritik ini dengan menunjukkan kecenderungan guru menyederhanakan CBSA sekadar menjadi kerja kelompok tanpa substansi, sehingga siswa aktif secara fisik tetapi tidak secara kognitif. Dedi Supriadi (1986) menambahkan perspektif geografis dengan menunjukkan ketidaksesuaian CBSA dengan kondisi sekolah di daerah terpencil yang minim fasilitas, menggarisbawahi perlunya penyesuaian kontekstual. Winarno Surakhmad (1987) memberikan analisis sistemik dengan menunjuk ketidakselarasan antara pendekatan CBSA yang progresif dengan sistem evaluasi yang masih konvensional dan berorientasi kognitif. Sementara Slamet PH (1988) mengungkap dilema praktis guru yang terjebak antara tuntutan kurikulum baru dan kebiasaan mengajar tradisional, serta tekanan sistem pengawasan yang tidak mendukung inovasi pedagogis. Para pakar sepakat bahwa meskipun CBSA secara konseptual merupakan lompatan maju dalam pedagogi Indonesia, implementasinya gagal karena empat faktor kunci: (1) kesenjangan kompetensi guru, (2) ketidakmerataan sarana pendidikan, (3) sistem evaluasi yang tidak relevan, dan (4) kurangnya pendampingan berkelanjutan. Kritik-kritik ini mengungkap kompleksitas perubahan kurikulum yang tidak hanya membutuhkan pembaruan konsep, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam ekosistem pendidikan termasuk budaya mengajar, sistem evaluasi, dan dukungan infrastruktur. Pelajaran dari Kurikulum 1984 ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di era berikutnya.

Perbandingan dan Analisis Kurikulum Tahun 1973, Kurikulum Tahun 1975 dan Kurikulum Tahun 1984

Setiap perubahan kurikulum mencerminkan upaya untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar lebih sesuai dengan tantangan zamannya. Kurikulum 1973, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984 merupakan tiga fase penting dalam evolusi pendidikan Indonesia yang menunjukkan pergeseran orientasi dari penanaman nilai ideologis, pendekatan instruksional yang sistematis, hingga penerapan model pembelajaran aktif berbasis siswa. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang membentuk arah perkembangan pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbandingan dan analisis kritis terhadap ketiga kurikulum ini guna memahami

kontribusi, tantangan, serta pelajaran yang dapat diambil untuk pengembangan kurikulum di masa depan.

Tabel 1. Perbandingan Umum Kurikulum Tahun 1973, Kurikulum Tahun 1975 dan Kurikulum Tahun 1984

Aspek	Kurikulum 1973	Kurikulum 1975	Kurikulum 1984
Fokus Utama	Stabilisasi nasional, Pancasila	Pencapaian tujuan instruksional	Aktivasi siswa, Belajar tuntas
Pendekatan	Isi berbasis nilai	Prosedural (TIU dan TIK)	Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)
Peran Guru	Pusat informasi (teacher center)	Pelaksana rencana yang kaku	Fasilitator dan pembimbing
Peran Siswa	Penerima pasif	Pasif, memenuhi tujuan spesifik	Aktif, berpikir dan berpartisipasi
Kurikulum Berorientasi	Stabilisasi nilai	Stabilisasi nilai	Stabilisasi nilai

Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Tahun 1973, Kurikulum Tahun 1975 dan Kurikulum Tahun 1984

Kurikulum 1973 memiliki beberapa keunggulan yang signifikan dalam konteks historis Indonesia pasca-1965. Kelebihannya terletak pada penekanan kuat terhadap pembentukan nasionalisme dan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila, yang sangat relevan dengan kebutuhan stabilisasi politik saat itu. Kurikulum ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap kondisi nasional, serta memiliki struktur yang relatif sederhana sehingga memudahkan implementasi di berbagai sekolah. Namun demikian, kurikulum ini memiliki beberapa kelemahan mendasar. Disusun dalam kondisi darurat, kurikulum ini kurang memiliki perencanaan yang matang dan sistematis. Orientasi pembelajarannya lebih berfokus pada penguasaan isi (content-based) melalui metode hafalan, ketimbang pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, pendekatan pembelajarannya yang teacher-centered dan minim inovasi membuat proses belajar cenderung satu arah, kurang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Kurikulum 1975 menawarkan beberapa kemajuan penting dalam sistem pendidikan Indonesia melalui pendekatannya yang terstruktur. Keunggulan utamanya terletak pada penggunaan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan Tujuan Instruksional Umum (TIU) yang membuat proses pembelajaran lebih terarah dan terukur. Sistem ini memungkinkan penilaian hasil belajar yang lebih objektif, sekaligus mendorong guru untuk menyusun rencana mengajar yang sistematis dan rinci. Namun, kurikulum ini juga memiliki beberapa

kelemahan signifikan. Sifatnya yang terlalu administratif dan kaku justru membebani guru dengan berbagai dokumen formal, sementara prosedur teknis yang ketat menghambat kreativitas pengajar dalam mengembangkan metode pembelajaran. Di sisi peserta didik, fokus yang berlebihan pada pencapaian tujuan instruksional membuat siswa cenderung pasif, karena dinamika pembelajaran aktif seringkali terabaikan demi mengejar target-target yang telah ditetapkan.

Kurikulum 1984 menandai kemajuan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang merevolusi peran siswa dari penerima pasif menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Keunggulan utama kurikulum ini meliputi penerapan prinsip Belajar Tuntas (Mastery Learning) yang memastikan penguasaan kompetensi sebelum melanjutkan materi, transformasi peran guru menjadi fasilitator pembelajaran, serta penyajian materi secara spiral yang memungkinkan pemahaman konsep secara bertahap dari yang sederhana hingga kompleks. Namun, implementasi kurikulum ini menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan CBSA seringkali hanya bersifat formalistik, dimana banyak guru yang belum sepenuhnya memahami filosofi pembelajaran aktif sehingga hanya menerapkannya sebagai aktivitas fisik semata. Kurikulum ini juga menuntut ketersediaan sarana-prasarana yang memadai dan pelatihan guru intensif. Dua hal yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia pada masa itu, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam kualitas implementasi antara sekolah di daerah maju dan terpencil.

Wawancara Praktisi

Bapak FX Sukirdi, S.Pd menekankan perbedaan karakteristik ketiga kurikulum yang beliau alami. Kurikulum 1973 dinilai efektif dalam menyiapkan guru melalui pelatihan praktik mengajar intensif di SPG, sementara Kurikulum 1975/1974 dianggap terlalu birokratis dengan tuntutan administrasi TIU/TIK yang membebani guru. Meski mengapresiasi pendekatan CBSA dalam Kurikulum 1984, beliau mengakui implementasinya terkendala oleh keterbatasan pemahaman guru dan sarana pendukung. Bapak Tupandiyo, S.Pd.SD memberikan perspektif berbeda dengan melihat Kurikulum 1973 sebagai fondasi modernisasi pendidikan melalui penekanan keterampilan praktis. Beliau justru memandang positif struktur TIU/TIK Kurikulum 1974 sebagai upaya sistematis peningkatan mutu pendidikan, meski mengkritik adopsi CBSA dalam Kurikulum 1984 yang dinilai terlalu terburu-buru tanpa persiapan memadai, sehingga hanya menjadi perubahan kosmetik. Bapak Wardoyo, S.Pd secara kritis menilai Kurikulum 1973 menghasilkan guru yang terampil teknis namun kurang memahami filosofi pendidikan

holistik. Beliau mengkritik kekakuan Kurikulum 1974 yang membelenggu kreativitas guru, tetapi justru melihat CBSA dalam Kurikulum 1984 sebagai terobosan progresif menuju pembelajaran yang memerdekakan, meski diakui belum optimal dilaksanakan. Ibu Dwi Barniati Sabitin, S.Pd menganalisis Kurikulum 1973 sebagai solusi jangka pendek memenuhi kebutuhan guru tanpa pembinaan karakter mendalam. Beliau mengapresiasi semangat pembangunan Kurikulum 1974 tapi menyesalkan orientasinya yang terlalu kuantitatif. Terhadap Kurikulum 1984, beliau menekankan nilai filosofis CBSA dalam membangun budaya belajar partisipatif dan berpikir kritis, meski implementasinya menghadapi tantangan kesiapan guru dan fasilitas.

Dari hasil wawancara dengan empat praktisi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 1973, 1974, dan 1984 memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, yang dinilai berbeda-beda tergantung sudut pandang dan pengalaman masing-masing narasumber. Kurikulum 1973, yang difokuskan pada pendidikan calon guru (SPG), dipandang berhasil dalam membekali keterampilan mengajar dasar secara teknis (Sukirdi, Dwi Barniati), namun dinilai masih kurang dalam membentuk karakter dan pemahaman filosofi pendidikan (Wardoyo, Dwi Barniati). Kurikulum 1974 dinilai membawa sistematika dan keteraturan dalam proses pembelajaran melalui konsep TIU dan TIK (Tupandiyo, Dwi Barniati), namun beberapa narasumber (Sukirdi, Wardoyo) mengkritik bahwa penerapannya terlalu menekankan administrasi sehingga mengurangi kreativitas guru dan kedekatan emosional dengan siswa. Sementara itu, Kurikulum 1984 yang memperkenalkan konsep CBSA (*Cara Belajar Siswa Aktif*) disambut beragam. Beberapa narasumber (Wardoyo, Dwi Barniati) melihatnya sebagai langkah besar menuju pendidikan yang lebih aktif dan mandiri, sedangkan yang lain (Tupandiyo) mengkritik pelaksanaannya yang belum efektif karena keterbatasan kesiapan guru dan sarana. Secara umum, keempat narasumber sepakat bahwa setiap kurikulum lahir dari kebutuhan zaman masing-masing, dan keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan sarana, serta pembinaan berkelanjutan. Kurikulum tidak cukup hanya dirancang dengan baik, tetapi juga harus mampu diterapkan dengan efektif di lapangan

Analisis Kritis

Perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia dari 1973 hingga 1984 merefleksikan respons sistematis terhadap tantangan nation-building era Orde Baru. Kurikulum 1973 yang lahir pasca-turbulensi politik 1965 berfokus pada stabilisasi ideologis melalui penanaman nilai Pancasila dan pembentukan kepribadian nasional. Kurikulum 1975 memperkenalkan modernisasi melalui pendekatan Tujuan Instruksional (TIU/TIK) yang terukur, sementara

Kurikulum 1984 melangkah lebih maju dengan konsep CBSA yang berorientasi pada aktivitas siswa. Ketiganya menunjukkan evolusi dari pendidikan sebagai alat politik menuju instrumen pembangunan sumber daya manusia.

Setiap kurikulum menawarkan inovasi sesuai zamannya: Kurikulum 1973 berhasil membangun kesadaran nasional dan keseragaman sistem pendidikan; Kurikulum 1975 memperkenalkan standarisasi pembelajaran melalui perencanaan berbasis tujuan yang sistematis; sedangkan Kurikulum 1984 menjadi pionir dalam menggeser paradigma ke student-centered learning melalui CBSA dan Mastery Learning. Keunggulan ini menunjukkan kemampuan adaptasi sistem pendidikan terhadap tuntutan pembangunan nasional, sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di era berikutnya.

Namun, implementasi ketiga kurikulum menghadapi tantangan struktural yang serius. Kurikulum 1973 dinilai terlalu mekanistik dan berorientasi hafalan; Kurikulum 1975 terjebak dalam formalisme administratif yang membelenggu kreativitas guru; sementara CBSA dalam Kurikulum 1984 sering direduksi menjadi aktivitas fisik tanpa substansi kognitif. Masalah utama terletak pada kesenjangan antara idealisme konseptual dengan realitas di lapangan, terutama terkait kesiapan guru, keterbatasan sarana, dan minimnya pendampingan profesional.

Secara sosio-politik, ketiga kurikulum mencerminkan karakteristik era Orde Baru yang sentralistik. Kurikulum 1973 dan 1975 menegaskan peran negara dalam mengontrol narasi pendidikan untuk stabilitas politik, sementara Kurikulum 1984 mulai mengakomodasi kebutuhan desentralisasi pembelajaran meski tetap dalam kerangka pembangunan nasional. Pendekatan ini menghasilkan ketegangan antara standardisasi nasional dengan kebutuhan lokal, serta antara tujuan ideologis dengan perkembangan pedagogik global.

Dalam konteks kekinian, elemen-elemen tertentu dari ketiga kurikulum tetap relevan jika dilakukan adaptasi. Penekanan pada pendidikan karakter (1973), perencanaan pembelajaran terstruktur (1975), dan pembelajaran aktif (1984) dapat diintegrasikan dengan pendekatan modern seperti STEAM education dan literasi digital. Namun, penerapan utuh kurikulum-kurikulum ini akan menghadapi tantangan berat terkait tuntutan keterampilan abad 21, keragaman peserta didik, dan perkembangan teknologi pendidikan yang disruptif.

Pengalaman implementasi ketiga kurikulum ini memberikan pelajaran berharga bagi reformasi pendidikan kontemporer: (1) perubahan kurikulum harus disertai dengan kesiapan ekosistem pendidikan secara holistik; (2) pelatihan guru berkelanjutan menjadi kunci

keberhasilan transformasi pedagogik; (3) fleksibilitas kurikulum perlu seimbang dengan standar kualitas; serta (4) evaluasi kurikulum harus berbasis bukti lapangan, bukan hanya kesesuaian administratif. Refleksi historis ini menegaskan bahwa kurikulum yang efektif adalah yang mampu merespons tantangan zaman tanpa mengorbankan hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi dan pemberdayaan.

Semua kurikulum ini relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang siap membangun negara melalui sektor ekonomi yang sedang berkembang pada waktu itu. Berdasarkan perbandingan dan analisis kritis terhadap Kurikulum 1973, 1975, dan 1984, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika kebutuhan nasional pada zamannya, baik dari segi politik, sosial, maupun pendidikan. Setiap kurikulum membawa semangat dan tujuan perbaikan yang relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa pada periode tersebut. Namun, keberhasilan penerapan kurikulum tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan konsep, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, sarana-prasarana pendukung, serta pemahaman yang benar terhadap filosofi pendidikan yang diusung. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari ketiga kurikulum tersebut, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa reformasi kurikulum harus selalu disertai dengan strategi implementasi yang matang agar tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, benar-benar dapat tercapai secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan telaah kritis terhadap Kurikulum 1973 (PPSP), Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kurikulum memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kurikulum 1973 (PPSP) berusaha mengatasi ketimpangan mutu pendidikan dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum lokal. Namun, keterbatasan sumber daya dan kesiapan tenaga pendidik menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Kurikulum 1975 kemudian membawa pembaruan melalui pendekatan Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK), yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terukur. Meskipun demikian, pendekatan yang terlalu prosedural justru mengurangi ruang kreativitas guru dan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya, Kurikulum 1984 memperkenalkan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan Belajar Tuntas, yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak guru belum siap

menerapkan prinsip CBSA dengan benar, ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Secara umum, perubahan kurikulum pada periode ini mencerminkan dinamika sosial-politik nasional dan tuntutan global. Namun, setiap pembaruan kurikulum memberikan pelajaran penting bahwa perubahan konsep harus selalu diiringi dengan kesiapan implementasi di lapangan, baik dari segi kompetensi guru, kelengkapan fasilitas, maupun sistem evaluasi pendidikan yang mendukung.

Berdasarkan simpulan mengenai perjalanan kurikulum di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum di masa mendatang. Pertama, peningkatan kapasitas guru perlu menjadi perhatian utama. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperkuat pelatihan serta pendampingan guru secara berkelanjutan, khususnya dalam memahami filosofi pembelajaran aktif, merancang pembelajaran berbasis kompetensi, dan menerapkan metode inovatif. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menunjang implementasi kurikulum yang aktif dan kontekstual. Sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran digital, serta sarana praktik keterampilan. Ketiga, pendekatan kurikulum hendaknya bersifat kontekstual dan fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi lokal, karakteristik peserta didik, serta dinamika global, agar satuan pendidikan memiliki ruang adaptasi yang memadai. Keempat, implementasi kurikulum perlu dievaluasi secara berkala melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas, guna menjamin relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan kurikulum tersebut. Kelima, peningkatan kesadaran filosofis dalam pendidikan harus ditekankan, bahwa pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga merupakan sarana untuk membentuk karakter, mengembangkan keterampilan hidup, serta menyiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto, S. (2015). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Beauchamp, G. A. (1986). *Curriculum theory: Meaning, development, and use*. Theory Into Practice, 21(1), 23–27.

Darmaningtyas, H. (2004). *Pendidikan dan kebijakan pendidikan: Studi tentang kurikulum dan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1973). *Program Pengajaran Satuan Pendidikan (PPSP): Pedoman Umum*. Jakarta: Depdikbud RI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum Sekolah Dasar 1975*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pendidikan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). *Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Kurikulum 1984*. Jakarta: Depdikbud RI.

Hamalik, O. (2003). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ihsan, F. (1983). *Tantangan implementasi kurikulum 1975: Kesiapan guru dan sarana-prasarana*. Jakarta: Gramedia.

Nasution, S. (1977). *Evaluasi kurikulum 1975: Prosedural atau kreatif?* Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, S. (1985). *Kurikulum 1984 dan implementasinya dalam pembelajaran aktif siswa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, S. (2008). *Dasar-dasar proses belajar mengajar*. Bumi Aksara.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pohan, L. A. (2019). *Analisis Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dalam Keterampilan Menulis Kalimat Sederhana Bahasa Jerman*. Interference: Journal of Language, Literature, and Linguistics, 1(2), 128.

Putri, R. (2019). Pengaruh Kebijakan Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran di Sekolah.

Safrudin,S.2010,*Landasan Pengembangan Kurikulum*,Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian dan Pendidikan Islam,7(2) hal 98-114

Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*. Kencana Prenada Media Group.

Sarwono, J. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Slamet, P. H. (1981). *Kurikulum 1975 dan pengaruhnya terhadap pendidikan dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Slamet, P. H. (1988). *Kurikulum 1984 dan penerapan CBSA: Evaluasi dan kritik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedijarto, S. (2008). *Kurikulum berbasis pembangunan masyarakat: Konsep dan penerapan dalam pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.

Soedijarto. (1993). *Pendidikan Nasional sebagai Wahana Pembudayaan dan Pemberdayaan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Subagyo, A. (2020). *Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Methods*. Inteligensia Media.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparlan, P. (2010). *Kurikulum dan tantangan implementasi dalam pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supriadi, D. (1980). *Implementasi kurikulum 1975 di daerah: Kritik dan saran*. Bandung: Alfabeta.

Supriadi, D. (1986). *Kurikulum 1984: Tantangan implementasi CBSA di daerah terpencil*. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, W. (1984). *Filsafat pendidikan dan kurikulum: Evaluasi terhadap kurikulum 1975*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surakhmad, W. (1987). *Evaluasi kurikulum 1984: Pendekatan CBSA dan perubahan paradigma belajar*. Bandung: Alfabeta.

Suryosubroto, B. (2002). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, S. (1986). *Pembelajaran aktif siswa: Teori dan praktik CBSA dalam kurikulum 1984*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyanto, S. (2006). *PPSP dan pembelajaran tematik: Menjawab kebutuhan pendidikan masa depan*. Bandung: Alfabeta.

Taba, H. (1962). *Curriculum development: Theory and practice*. Harcourt, Brace & Jovanovich.

Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tyler, R. W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. University of Chicago Press.

Zuhairini, A. (1987). *Pendidikan Islam dan nasionalisme di Indonesia: Dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 1975*. Jakarta: Rajawali Pers.